

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG**

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD)
TAHUN 2024 - 2026**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD; (2) Penyusunan rancangan Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (4) penetapan Renstra PD. Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan transportasi dengan kebijaksanaan pembangunan daerah serta memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Lumajang khususnya dibidang Perhubungan.

Dalam pembahasan Renstra PD tersebut dipergunakan untuk faktor-faktor yang berpengaruh baik faktor internal maupun eksternal yang diharapkan dapat memberikan data-data yang valid sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, keputusan, dalam pencapaian tujuan.

Kami menyadari bahwa Renstra PD ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lumajang 4 Mei 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG



[Handwritten signature]
NUGRAHA YUDHA M, S. Sos. M. Si.

[Handwritten signature]
NIP. 19711102 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan	8
2.2 Sumberdaya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Lumajang	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	31
2.5 Mitra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Dalam Pemberian Pelayanan	34
2.6 Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang	36
3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	37
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	37
3.2 Isu Strategis	40
4. TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran	41
4.2 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan	45
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1 Strategi	49
5.2 Kebijakan	49
6. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	51

SERTA PENDANAAN	51
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	81
6.2 Pendanaan	82
7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026	82
7.2. Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	88
8. PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru merupakan Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Dinas Perhubungan kabupaten Lumajang. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Penyusunan RENSTRA PD mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, dan RPD Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026.

Mewujudkan Lumajang yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Lumajang. Selain mendorong pertumbuhan

ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lumajang. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana Prasarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Perhubungan untuk 3 (tiga) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu RENSTRA PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, baik evaluasi RENSTRA PD maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
14. SEB 4 Menteri: Men Bappenas, Menkeu, Mendagri & KPPPA; Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2022-2024.
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu Tahun 2024–2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Sedangkan tujuan Penyusunan RENSTRA PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka sistematika penulisan RENSTRA PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DINAS PERHUBUNGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5. Mitra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.6. Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
- 3.2. Isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran;
- 4.2. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan.

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

6.2. Pendanaan.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra PD
Tahun 2024-2026;

7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

Bab VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan

1. Tugas Pokok.

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan
- b. Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
 3. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Perubahan RENSTRA, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
 4. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 5. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

6. melakukan administrasi kepegawaian;
7. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
8. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
9. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
10. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
11. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
3. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
4. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
5. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
6. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
7. melakukan urusan gaji pegawai;
8. melakukan administrasi keuangan;

9. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 10. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
 11. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- e. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.
- f. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
1. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
 2. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan di bidang lalu lintas;
 3. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 4. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas;
 5. perumusan kebijakan teknis dan strategi bidang lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

6. pelaksanaan perumusan pengendalian, operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 7. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait;
 8. pelaksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
 9. perencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
- g. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 2. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 3. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
 5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan penetapan kelas jalan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 6. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 7. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta didik/pelajar/mahasiswa mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, kelacaran

lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku:

8. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalisis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan- bahan dang langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas;
 9. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
 10. melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
 11. Monotoring dan evaluasi pelaksanaan Seksi Keselamatan lalu lintas;
 12. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
- h. Bidang Angkutan, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian
- i. Seksi Fasilitasi Angkutan, mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman kerja;
 2. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;
 3. memberikan ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang;
 4. memberikan ijin usaha untuk kendaraan angkutan orang dan angkutan barang;

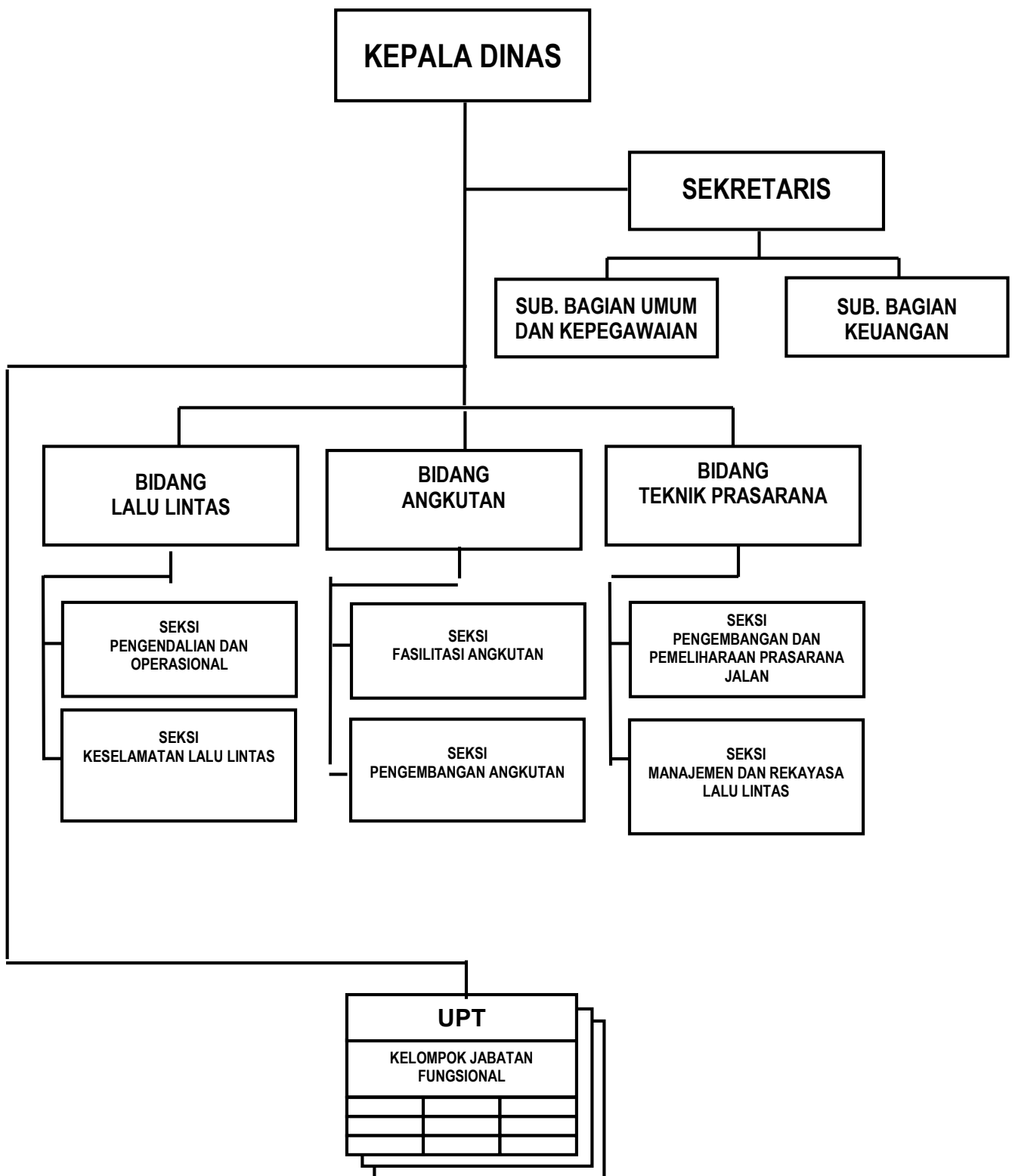
5. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan angkutan barang;
 6. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
 7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten;
 8. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;
 9. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Angkutan;
 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah Kabupaten Lumajang;
- j. Seksi Pengembangan Angkutan, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Barang, perkretaapian dan Laut sebagai pedoman kerja;
 2. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang dan angkutan barang;
 3. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis angkutan orang dan angkutan barang;
 4. Menetapkan jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah Kabupaten;
 5. Serta jaringan jalur angkutan barang yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 6. Merencanakan, menyusun, dan penyiapan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah kabupaten;
 7. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Angkutan;

- k. Bidang Sarana dan Prasarana
merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Prasarana
- l. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, mempunyai tugas :
1. Menyusun bahan rencana astrategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan sebagai pedoman kerja;
 2. merencanakan dan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte, penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 3. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
 4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
- m. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 2. Merencanakan dan pengendalian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
5. Melaksanakan pemasangan Traffic Light, Warning Light, Pelican Cross, Rambu-rambu Lalu Lintas dan Pengecatan marka;
6. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang Manajemen dan Rekayasa lalu lintas penunjang transportasi dan lalu lintas;
8. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;

Secara umum Tugas Pokok Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang digambar dengan bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana Bagan 2.1.

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang



Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan dan telekomunikasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan telekomunikasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

1. Angkutan Jalan

a. Prasarana Transportasi (Jalan)

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu,

tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Lumajang memiliki 4 (empat) terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa tipe dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 2.1
Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Lokasi/Alamat/ No. Telp.	Type	Ket.
1.	MPU Lumajang	Jl. Gubernur Suryo	C	
2.	Pronojiwo	Jl. Pronojiwo	C	
3.	Pasirian	Jl. Pasirian	C	
4.	Klakah	Jl. Klakah	C	

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk kewenangan Kabupaten adalah hanya Terminal Tipe C.

Tabel 2.2
Fasilitas Terminal MPU Lumajang

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*			*	
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*			*	
c. Tempat parkir	*			*	
d. Bangunan kantor		*			
e. Tempat tunggu penumpang	*			*	
f. Menara pengawas		*			
g. Locket		*			
h. Pelataran parkir		*			
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman	*		*		
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan	*			*	
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	*			*	
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan	*			*	

Berdasarkan Tabel 2.2 bahwa kondisi fasilitas Terminal MPU Lumajang masih standar, karena 5 Fasilitas kondisi baik dan 1 Fasilitas kondisi tidak baik dengan capaian 83%..

Tabel 2.3
Fasilitas Terminal Pronojiwo

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman		*			
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan		*			
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	*		*		
b. Musholla	*		*		
c. Kios/Kantin	*		*		
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

Berdasarkan Tabel 2.3 bahwa kondisi fasilitas Terminal Pronojiwo masih standar, karena 5 Fasilitas kondisi baik dan 1 Fasilitas kondisi tidak baik dengan capaian 83%.

Tabel 2.4
Fasilitas Terminal Pasirian

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loker		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman		*			
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan		*			
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet		*			
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

Berdasarkan Tabel 2.4 bahwa kondisi fasilitas Terminal Pasirian tidak sesuai standar, karena 3 Fasilitas kondisi baik dan 3 Fasilitas kondisi tidak baik dengan capaian 50%.

Tabel 2.5
Fasilitas Terminal Klakah

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
Fasilitas Utama					
j. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
k. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
l. Tempat parkir	*		*		
m. Bangunan kantor	*		*		
n. Tempat tunggu penumpang	*		*		
o. Menara pengawas		*			
p. Locket		*			
q. Pelataran parkir bus	*			*	
r. Rambu					
4. Papan Pengumuman		*			
5. Daftar/papan tarif per trayek		*			
6. Daftar/petunjuk jurusan		*			
Fasilitas Penunjang					
h. Toilet		*			
i. Musholla		*			
j. Kios/Kantin		*			
k. Ruang pengobatan		*			
l. Ruang informasi		*			
m. Ruang Perwakilan		*			
n. Taman penghijauan		*			

Berdasarkan Tabel 2.5 bahwa kondisi fasilitas Terminal Klakah sesuai standar, karena 5 Fasilitas kondisi baik dan 1 Fasilitas kondisi tidak baik dengan capaian 83%.

c. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lumajang yaitu Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

d. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki pegawai sejumlah 271 orang terdiri dari 115 orang berstatus PNS, 156 orang tenaga kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari jenis kelamin adalah:

- Laki-laki	:	106	orang
- Perempuan	:	9	orang

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

- Magister (S2)	:	3	orang
- Sarjana (S1)	:	11	orang
- Diploma III (D3)	:	3	orang
- SLTA	:	52	orang
- SLTP	:	26	orang
- SD	:	10	orang

c. Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut:

- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	0	orang
- Pembina (IV/a)	:	3	orang
- Penata tingkat I (III/d)	:	6	orang
- Penata (III/c)	:	4	orang
- Penata Muda tingkat I (III/b)	:	0	orang
- Penata Muda (III/a)	:	5	orang
- Pengatur tingkat I (II/d)	:	3	orang
- Pengatur (II/c)	:	9	orang
- Pengatur Muda tingkat I (II/c)	:	27	orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	14	orang
- Juru Tingkat I (I/d)	:	32	orang
- Juru I (I/c)	:	1	orang

d. Pejabat struktural dan Fungsional

- Struktural (Eselon II, III, dan IV)	:	13	orang
• Eselon II	:	1	orang
• Eselon III	:	4	orang
• Eselon IV	:	8	orang
- Fungsional	:		
• Penyelia	:	2	orang
• Penguji PKB Terampil	:	2	orang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan di bidang Perhubungan selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan kondisi sebagai berikut :

- A. Kepala Bidang Lalu Lintas
 - a. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Analisis Data Kejadian Laka Lantas
 - c. Sosialisasi tentang ketertiban Lalu Lintas
 - d. Operasi gabungan
 - e. Data sajian lalu lintas
 - f. Pemasangan Rambu-rambu, Traffic Light, Warning Light, dan Pelican Cross.
- B. Kepala Bidang Angkutan
 - a. Pemberian perizinan angkutan umum
 - b. Sosialisasi standar keselamatan angkutan umum
 - c. Fasilitasi Angkutan Kota.
 - d. Pemilihan dan Pemberian penghargaan abdi yasa
- C. Kepala Bidang Prasarana
 - a. Pemasangan prasarana jalan
 - b. Pengecatan Marka
 - c. Pengadaan Alat Penerangan Jalan
 - d. Pemeliharaan Perlengkapan jalan
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor dan Terminal.

Gambaran Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 2.1.

Tabel 2.1 TC 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	N/A	N/A	3,00	6,00	5,27	4,86	4,11	3,00	6,00	0,01%	0,25%	N/A	100	100	0,0019	0,0514	N/A
	Persentase Penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,27 %	3,06 %	2,45 %	N/A	N/A	1,1%	1,15%	N/A	N/A	N/A	25,761	37,582	N/A
2	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	N/A	N/A	N/A	19 %	10 %	12,3 %	13,2 %	14,7 %	19 %	10 %	8,1%	45,34%	N/A	100	100	65,854	343,48	N/A

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A	52,85%	84%	N/A	N/A	N/A	52,85	84	N/A
3	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	N/A	N/A	N/A	88 %	90 %	91,13 %	92,57 %	93,11 %	88%	90 %	92%	94,50%	N/A	100	100	100,95	102,08	N/A
	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,13 %	90,57 %	91,11 %	N/A	N/A	90,45%	92%	N/A	N/A	N/A	101,48	101,58	N/A

Berdasarkan Tabel 2I TC 23 dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai Sasaran Dinas Perhubungan terbilang efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja lebih tinggi dari tingkat capaian realisasi anggaran, untuk ditahun kedepan akan lebih optimal dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian utama Dinas Perhubungan.

Tabel 2.2 TC 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan 2019-2023
 Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.614.218.700	1.364.432.100	N/A	N/A	N/A	1.557.912.529	1.247.882.433	N/A	N/A	N/A	0,97	0,91	N/A	N/A	N/A	-0,15	-0,01
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.238.355.000	1.333.090.400	N/A	N/A	N/A	3.088.425.000	1.129.182.614	N/A	N/A	N/A	0,95	0,85	N/A	N/A	N/A	-0,59	-0,03
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	43.252.000	24.647.000	N/A	N/A	N/A	40.789.400	23.807.780	N/A	N/A	N/A	0,94	0,97	N/A	N/A	N/A	-0,43	0,01

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.339.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.134.405.800	N/A	N/A	N/A	N/A	0,91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	12.793.375.180	14.113.135.676	14.409.710.370	N/A	N/A	12.458.945.141	12.968.792.819	2.055.731.315	N/A	N/A	0,97	0,92	0,14	0,11	-0,45
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.494.252.000	3.249.908.600	N/A	N/A	N/A	1.253.338.000	2.759.394.813	N/A	N/A	N/A	0,84	0,85	N/A	N/A	N/A	1,17	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.510.467.000	2.201.422.200	N/A	N/A	N/A	1.433.824.841	2.126.955.381	N/A	N/A	N/A	0,95	0,97	N/A	N/A	N/A	0,46	0,00
PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	25.946.128.500	21.978.849.400	N/A	N/A	N/A	24.662.365.938	21.427.886.284	N/A	N/A	N/A	0,95	0,97	N/A	N/A	N/A	-0,15	0,01

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	N/A	N/A	22.158.094.723	23.363.141.764	22.987.322.067	N/A	N/A	21.798.933.989	22.632.748.325	5.164.442.421	N/A	N/A	0,98	0,97	0,22	0,05	-0,39

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Layanan	Sasaran Pelayanan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	Sopir dan Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Penyediaan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Masyarakat Lumajang
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	Fasilitasi Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	Pengguna Kendaraan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Masyarakat Lumajang

Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Layanan	Sasaran Pelayanan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	Pengguna Kendaraan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sopir dan Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan peningkatan angkutan umum yang memadai	Peningkatan ketersediaan angkutan umum yang memadai	Sopir dan Pemilik Kendaraan Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	Peningkatan Trayek yang dilewati angkutan umum	Sopir dan Pemilik Kendaraan Angkutan Umum
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	Penyediaan dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Penumpang, Sopir dan Pemilik Kendaraan Angkutan Umum
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Penyediaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Penumpang, Sopir dan Pemilik Kendaraan Angkutan Umum
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Penyediaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Penumpang, Sopir dan Pemilik Kendaraan Angkutan Umum

Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Layanan	Sasaran Pelayanan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	Fasilitasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Sopir dan Pemilik Kendaraan Angkutan Umum
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	Penyediaan Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi	Sopir dan Pemilik Kendaraan Angkutan Umum
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan prasarana perhubungan	Peningkatan pemenuhan prasarana perhubungan	Masyarakat Lumajang dan Pengguna Jalan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	Peningkatan kondisi Perlengkapan Jalan	Masyarakat Lumajang dan Pengguna Jalan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang dilaksanakan	Pemenuhan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Masyarakat Lumajang dan Pengguna Jalan

2.5 Mitra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Dalam Pemberian Pelayanan

Pentingnya dalam mewujudkan Transportasi Kabupaten Lumajang ramah dan nyaman yang berkelanjutan sebagai suatu sistem transportasi yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diantisipasi generasi yang akan datang. Dalam hal tersebut Dinas Perhubungan memerlukan dukungan kerjasama dengan Mitra Strategis untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan Transportasi di Kabupaten Lumajang. Adapun Mitra Strategis sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana Jalan

Melaksanakan Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya, penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan, perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan, penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan, uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. Dalam hal ini dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang, UPT Bina Marga Provinsi Jawa

Timur, Satlantas Polres Lumajang dan pihak Akademisi di Kabupaten Lumajang.

b. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perizinan angkutan umum, pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan /atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan Satlantas Polres Lumajang, Pengusaha Angkutan Umum, Organda Kabupaten Lumajang, dan Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Lumajang.

2.6 Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki kerjasama dengan yaitu Parkir Berlangganan di Kabupaten Lumajang, Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang (dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Lumajang Nomor : 970/01/427.56/2022. Nomor : 188/005/202/2022, Nomor : 18/1/2022/Polres tentang Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Lumajang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Pelayanan Dinas Perhubungan

Sektor perhubungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peramnan masyarakat sangat besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat bidang transportasi. Hal ini berjalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang modern, bahwa setiap peranan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan handal.

Adapun indentifikasi permasalahan selama 3 (tiga) tahun kedepan adalah :

1. Prasarana jalan yang kurang memadai;
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;
4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
5. Belum adanya aturan / acuan tentang kecelakaan Lalu Lintas baik penanganan kejadian, Sytem pelaporan,

analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;

6 . Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor;

Permasalahan dan isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 TB.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurang optimalnya pelayanan transportasi	<p>Rendahnya kepatuhan pengusaha angkutan umum dalam melakukan uji kir berkala</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan</p> <p>Terbatasnya material untuk pemeliharaan perlengkapan jalan</p> <p>Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan</p> <p>Adanya persaingan usaha dengan angkutan umum online yang berdampak pada penurunan pendapatan</p> <p>Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</p>

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah Meningkatkan konektivitas wilayah beserta prasarana perhubungan dengan jalan penurunan pelanggaran lalu lintas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Transportasi yang Ramah dan Nyaman di Kabupaten Lumajang, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu tiga (3) tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis Perangkat daerah yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 1 dari dokumen RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan = Terciptanya infrastruktur pendukung perekonomian

Sasaran = Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai

Dengan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi serta penurunan angka kecelakaan dengan “ Meningkatkan konektivitas wilayah beserta prasarana perhubungan dengan jalan penurunan pelanggaran lalu lintas “ mempunyai 4 (empat) indikator kinerja Utama yaitu :

- a Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan;
- b Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan;
- c Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama tiga tahun kedepan sesuai dengan Tabel 4.1.

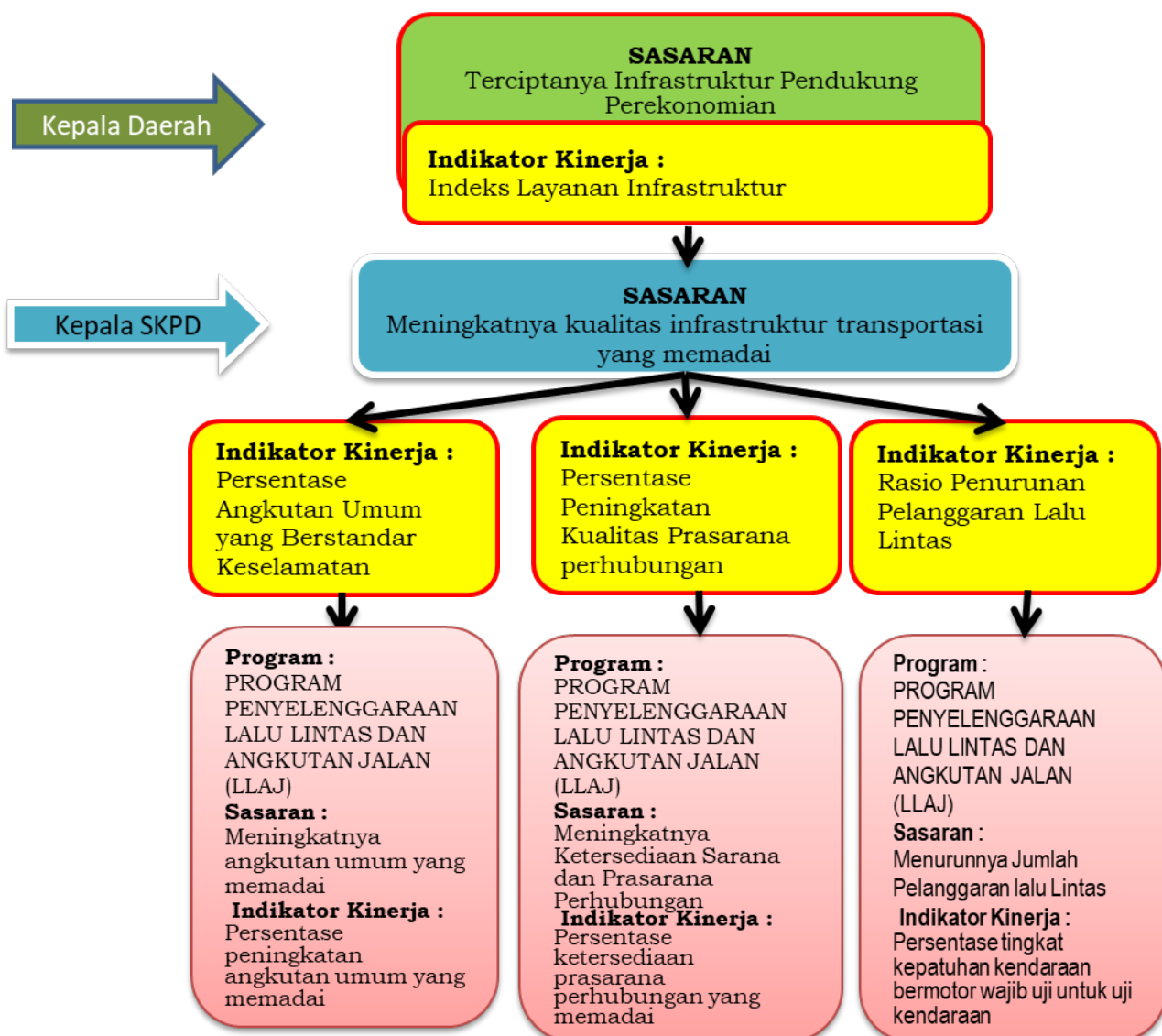
Tabel 4.1 TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian		Indeks Layanan Infrastruktur	%	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dibagi 4	86,09	86,79	87,45
	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	angka	Jumlah pelanggaran/Jumlah Kendaraan	3,26	2,74	2,27
		Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	(Jumlah angkutan umum yang laik jalan/Jumlah angkutan umum) x 100%	46,70	48,64	49,85

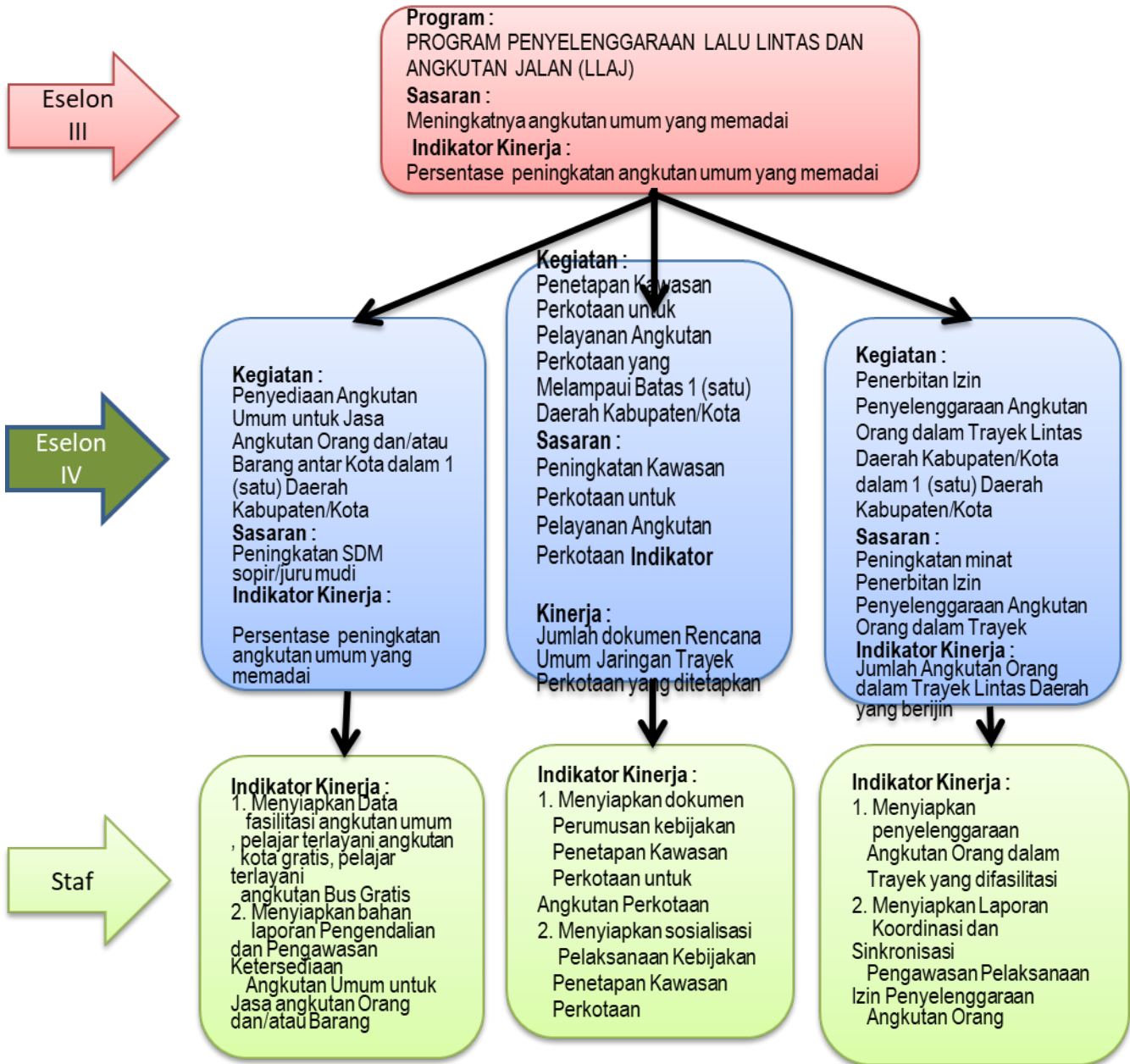
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	(Jumlah Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik/ Jumlah Prasarana Perhubungan)x100%	95,22	96,35	97,41

4.2 Cascading Kinerja

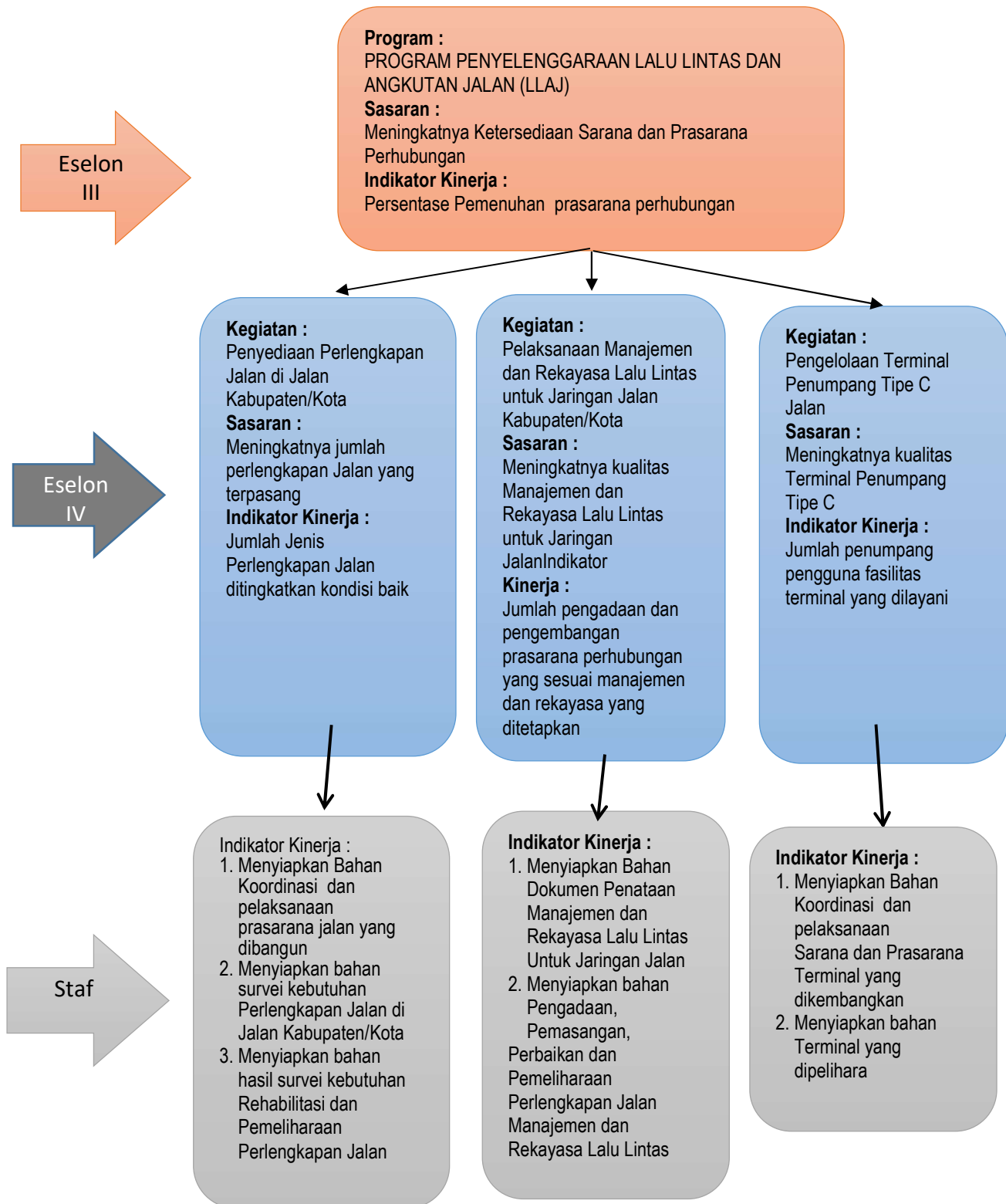
Dalam pelaksanaan Kinerja Urusan Perhubungan perlu adanya penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Adapun cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



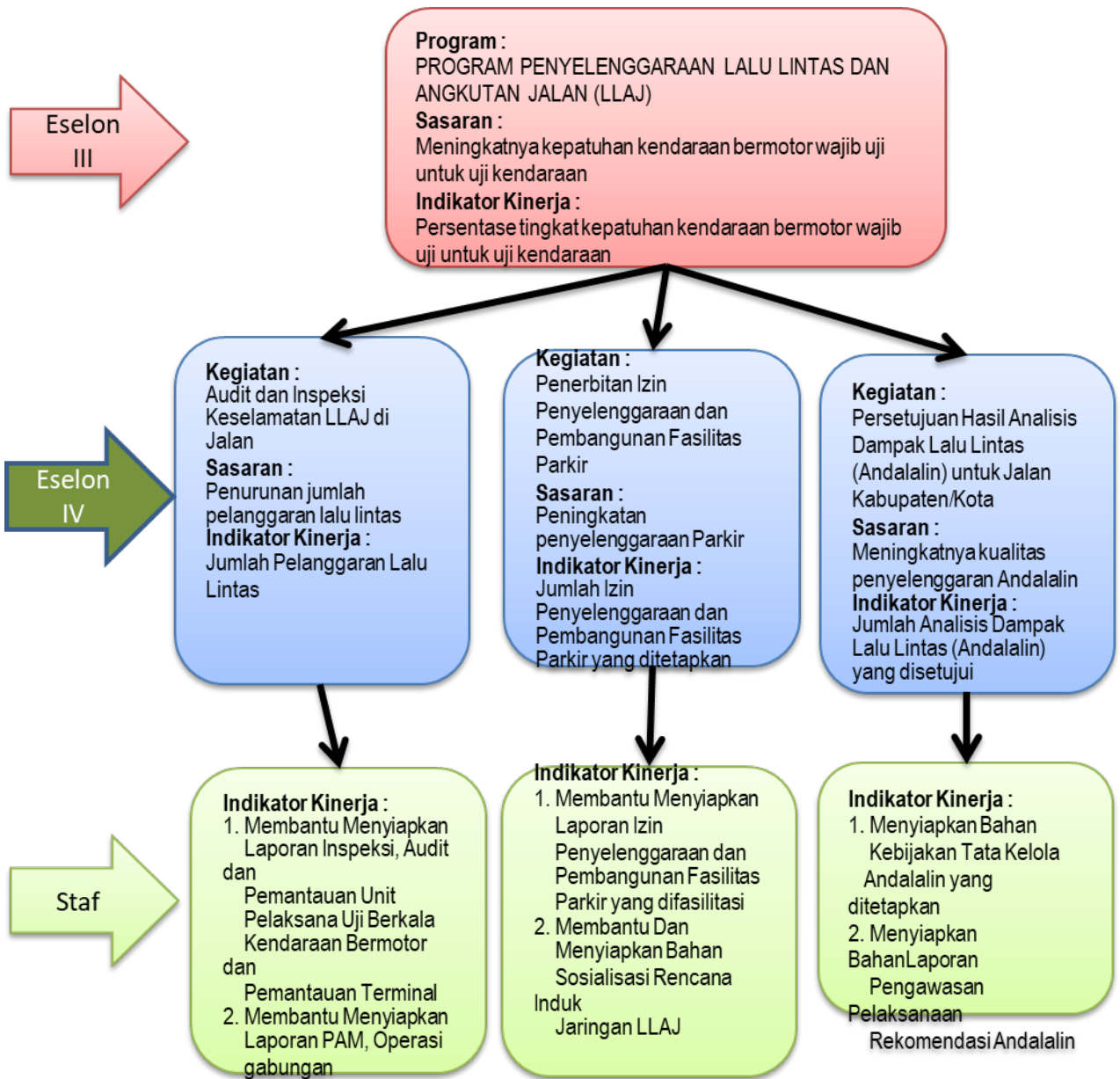
CASCADING KINERJA BIDANG ANGKUTAN



CASCADING KINERJA BIDANG TEKNIK PRASARANA



CADING KINERJA BIDANG LALU LINTAS



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata guna pencapaian tujuan Kabupaten Lumajang. Berdasarkan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Lumajang selama tiga tahun mendatang (2024-2026) yaitu Meningkatkan konektivitas wilayah beserta prasarana perhubungan dengan jalan penurunan pelanggaran lalu lintas.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas prasarana Perhubungan;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan perlintasan sebidang KA;
- c. Meningkatkan ketersediaan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

Adapun strategi dan Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan sesuai dengan Tabel 5.1.

TABEL 5.1 (TC 26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Terciptanya infrastruktur pendukung perekonomian	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1	Meningkatkan konektivitas wilayah beserta prasarana perhubungan dengan jalan penurunan pelanggaran lalu lintas	1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2024–2026 sesuai dengan Tabel 6.1, adalah sebagai berikut:

a. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Kegiatannya:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatannya:

1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
6. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
 8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

13. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- Pembangunan Gedung Terminal
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Program dan Kegiatan tahun 2024–2026 dijabarkan pada TC 27 sebagaimana Tabel 6.1 tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Tabel 6.1 TC 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	%	(jumlah kendaraan yg uji/jumlah kendaraan wajib uji) x 100 %	48%	50,80%	1.684.500.000	52,35%	2.170.000.000	54,62 %	2.175.000.000	54,62 %	6.029.500.000	Dinas Perhubungan	Kabupaten Lumajang
2.15.0 2.2.01	Ditetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	N/A	1 Dokumen	107.700.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	357.700.000		
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	1 Dokumen	7.700.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	37.700.000		
	Terkendalinya pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	1 Laporan	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	20.000.000		
2.15.0 2.2.04	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	Dokumen	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	N/A	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	60.000.000		
	Terfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	18 Dokumen	30.000.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	N/A	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	18 Laporan	30.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.15.0 2.2.07	Terlaksananya fasilitasi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	Dokumen	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	11 Dokumen	5 Dokumen	82.400.000	5 Dokumen	95.000.000	5 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	277.400.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.03 Peningkatan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	N/A	12 Laporan	77.400.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	90.000.000	36 Laporan	252.400.000		
	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	25.000.000		
2.15.0 2.2.08	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	6.606 pelanggaran	6.500 Pelanggaran	914.200.000	6.210 Pelanggaran	990.000.000	5.800 Pelanggaran	990.000.000	5.800 Pelanggaran	2.894.200.000		
	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	30 orang	-	30 orang	20.000.000	30 orang	20.000.000	30 orang	40.000.000		
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	N/A	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	30.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	12 laporan	12 Laporan	904.200.000	12 Laporan	950.000.000	12 Laporan	950.000.000	36 Laporan	2.804.200.000		
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	N/A	6 Laporan	-	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	18 Laporan	20.000.000		
2.15.02.2.05	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	unit	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	5.316 unit	5.504 unit	560.200.000	5.685 unit	940.000.000	5.812 unit	940.000.000	17.001 unit	2.440.200.000		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana (Alat Uji Kendaraan) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	18 unit	18 unit	245.200.000	18 unit	250.000.000	18 unit	250.000.000	18 unit	745.200.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	25 orang	-	25 orang	20.000.000	25 orang	20.000.000	25 orang	40.000.000		
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	4000 set	4000 Dokumen	120.000.000	4000 Dokumen	150.000.000	4000 Dokumen	150.000.000	12.000 Dokumen	420.000.000		
	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	2 laporan	-	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	6 laporan	20.000.000		
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana (Alat uji) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	9 unit	9 unit	195.000.000	9 unit	500.000.000	9 unit	500.000.000	9 unit	1.195.000.000		
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	12 laporan	-	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	36 laporan	20.000.000		
														-		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang memadai	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan	%	(Realisasi-Target)/Target x 100 %	N/A	4,20%	934.565.500	5,35%	1.485.000.000	6,52%	1.180.000.000	6,52%	3.599.565.500		
2.15.0 2.2.03	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	orang	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	75.748 orang	84.700 orang	310.965.500	84.700 orang	500.000.000	84.700 orang	500.000.000	254.100 orang	1.310.965.500		
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang dipelihara	unit	Jumlah Terminal yang dipelihara	2 unit	4 Unit	310.965.500	4 Unit	500.000.000	4 Unit	500.000.000	4 Unit	1.310.965.500		
2.15.0 2.2.09	Tersedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	Trayek	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	3 Trayek	3 Trayek	593.600.000	3 Trayek	660.000.000	3 Trayek	660.000.000	3 Trayek	1.913.600.000		
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 unit	52 unit	593.600.000	52 unit	650.000.000	52 unit	650.000.000	52 unit	1.893.600.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Terkendalinya dan terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	20.000.000		
2.15.0 2.2.10	Ditetapkannya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	90.000.000	-	-	1 Dokumen	90.000.000		
	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.10.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	70.000.000	-	-	1 Dokumen	70.000.000		
	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	20.000.000	-	-	1 Dokumen	20.000.000		
2.15.0 2.2.11	Ditetapkannya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	N/A	-	-	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	80.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000		
	Ditetapkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	20.000.000	-	-	1 Dokumen	20.000.000		
	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.03 Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000		
2.15.0 2.2.12	Ditetapkannya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	N/A	-	-	1 Dokumen	60.000.000	-	-	1 Dokumen	60.000.000		
	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	60.000.000	-	-	1 Dokumen	60.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.15.0 2.2.14	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	Dokumen	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	N/A	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	15 Dokumen	30.000.000		
	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	18 Laporan	30.000.000		
2.15.0 2.2.16	Ditetapkannya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	N/A	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	115.000.000		
	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	50.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	10.000.000	-	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	30.000.000		
	Terkendalinya dan terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	5.000.000	3 laporan	25.000.000		
														-		
	Terlaksananya pemenuhan prasarana perhubungan yang memadai	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	%	Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang/Jumlah Kebutuhan Perlengkapan jalan x 100%	43,85%	44,60%	21.707.367.481	45,85%	23.104.076.279	46,55%	26.079.983.906	46,55%	70.891.427.666		
2.15.02.2.02	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ditingkatkan kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	unit	Jumlah Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	2 Jenis	4.100 unit	20.904.234.500	4.312 unit	21.704.234.500	4.475 unit	24.088.056.256	4.475 unit	66.696.525.256		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	unit	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan (APJ) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 unit	40 unit	505.000.000	143 unit	805.000.000	143 unit	1.588.821.756	429 unit	2.898.821.756		
	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6800 unit	5.600 Unit	20.399.234.500	6.975 Unit	20.899.234.500	6.975 Unit	22.499.234.500	6.975 Unit	63.797.703.500		
2.15.02.2.06	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang dilaksanakan	Kegiatan	Jumlah manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang dilaksanakan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	803.132.981	2 Kegiatan	1.399.841.779	2 Kegiatan	1.991.927.650	6 Kegiatan	4.194.902.410		
	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	unit	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.511 buah	513 unit	773.132.981	1.322 unit	1.369.841.779	1.322 unit	1.849.927.650	3.966 unit	3.992.902.410		
	Terawasinya dan terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	12 Laporan	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	22.000.000	30 Laporan	42.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	Laporan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	6 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	120.000.000	36 Laporan	160.000.000		
#### #	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	(Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi/Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan)x 100%	100%	100%	14.357.710.389	100%	15.793.481.427	100%	17.372.829.569	100%	47.524.021.385		
2.15.0 1.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	(Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi/Jumlah fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan)x 100%	100%	100%	14.000.000	100%	26.900.000	100%	26.900.000	100%	67.800.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	4.300.000	2 Dokumen	4.300.000	7 Dokumen	10.600.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.300.000	3 Dokumen	8.600.000		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.300.000	2 Dokumen	3.300.000	6 Dokumen	8.600.000		
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.300.000	3 Dokumen	6.600.000		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.300.000	3 Dokumen	6.600.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	7.400.000	5 Laporan	7.400.000	15 Laporan	17.800.000		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	36 Laporan	9.000.000		
2.15.01.2.02	Terpenuhnya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	(Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan)x 100%	100%	100%	9.637.296.907	100%	9.774.331.839	100%	9.774.331.839	100%	29.185.960.585		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 orang	116 orang/12 bulan	9.567.360.907	116 orang/12 bulan	9.700.895.839	116 orang/12bulan	9.700.895.839	116 orang/36bulan	28.969.152.585		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	63.936.000	12 Dokumen	63.936.000	12 Dokumen	63.936.000	36 Dokumen	191.808.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.15.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	36 Dokumen	8.000.000		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	3 Laporan	8.000.000		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	36 Laporan	9.000.000		
2.15.01.2.03	Tepuhnya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	%	(Jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan)x 100%	100%	100%	5.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	23.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.15.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	6 Dokumen	8.000.000		
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.15.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	6 Laporan	7.000.000		
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	36 Laporan	8.000.000		
2.15.0 1.2.04	Terpenuhinya fasilitas administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	%	(Jumlah fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang direncanakan)x 100%	100%	100%	2.223.100.000	100%	2.524.100.000	100%	2.524.100.000	100%	7.271.300.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya rencana pengelolaan Retribusi Daerah	2.15.01.2.04.01 Perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen rencana pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen rencana pengelolaan Retribusi Daerah	N/A	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	9 Dokumen	8.000.000		
	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2.15.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	10 Dokumen	12 Dokumen	2.221.100.000	12 Dokumen	2.521.100.000	12 Dokumen	2.521.100.000	36 Dokumen	7.263.300.000		
2.15.01.2.05	Terpenuhiya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	%	(Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian PD yang direncanakan)x 100%	100%	100%	6.800.000	100%	334.000.000	100%	583.711.830	100%	924.511.830		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	275 Paket	-	275 Paket	250.000.000	275 Paket	499.711.830	825 Paket	749.711.830		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	36 Dokumen	7.900.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.15.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	9 Dokumen	6.000.000		
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	36 Dokumen	7.900.000		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	250 Orang	3.000.000	250 Orang	75.000.000	250 Orang	75.000.000	750 Orang	153.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.15.0 1.2.06	Terpeenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	%	(Jumlah fasilitas Administrasi Umum PD yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Umum PD yang direncanakan)x 100%	100%	100%	371.794.934	100%	466.162.200	100%	536.162.200	100%	1.374.119.334		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.638.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	3 Paket	72.638.000		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	121.664.734	3 Paket	125.000.000	3 Paket	125.000.000	9 Paket	371.664.734		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	111.162.200	2 Paket	111.162.200	2 Paket	111.162.200	6 Paket	333.486.600		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A	10 Dokumen	-	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	10.000.000		
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporaan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A	12 Laporan	-	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	36 Laporan	40.000.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 Laporan	116.330.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	250.000.000	36 Laporan	546.330.000		
2.15.01.2.07	Terperuhnya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	%	(Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang terpenuhi/Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang direncanakan)x 100%	100%	100%	25.400.000	100%	330.000.000	100%	750.000.000	100%	1.105.400.000		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	N/A	8 unit	-	1 unit	180.000.000	1 unit	500.000.000	10 unit	680.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	9 unit	25.400.000	9 unit	150.000.000	-	250.000.000	18 unit	425.400.000		
2.15.0 1.2.08	Terpenuhinya fasilitas jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	(Jumlah fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipenuhi/Jumlah fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang direncanakan)x 100%	100%	100%	681.939.600	100%	718.459.600	100%	788.000.000	100%	2.188.399.200		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	134.880.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	170.000.000	36 Laporan	454.880.000		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.600.000	12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	18.000.000	36 Laporan	51.600.000		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	531.459.600	12 Laporan	550.459.600	12 Laporan	600.000.000	36 Laporan	1.681.919.200		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.15.0 1.2.09	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	%	(Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan/ Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan)x 100%	100%	100%	1.392.378.948	100%	1.610.527.788	100%	2.380.623.700	100%	5.383.530.436		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 unit	53 Unit	827.123.700	53 Unit	827.123.700	53 Unit	827.123.700	53 Unit	2.481.371.100		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	120 unit	53.500.000	120 unit	53.500.000	120 unit	53.500.000	360 unit	160.500.000		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	511.755.248	1 Unit	729.904.088	1 Unit	1.500.000.000	3 Unit	2.741.659.336		

6.2 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan ketersediaan dana yang relatif besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Lumajang;
2. APBD Propinsi Jawa Timur;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll);
5. Sedangkan pagu indikatif sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026

Dalam RPD Kabupaten Lumajang 2024–2026 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Perhubungan meliputi :

1. Indikator Kinerja PD
2. Indikator Kinerja Program

Perumusan indikator kinerja Dinas Perhubungan tahun ke-0 (2023) merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun ke-1 (2024) sampai dengan tahun ke-3 (2026) merupakan target kinerja yang direncanakan.

7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sesuai rumusan sasaran Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian dalam RPD Tahun 2024–2026, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2024–2026 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk

mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2024–2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. keselamatan Transportasi

- Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum;
- Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
- Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta perlintasan sebidang KA;

b. Pelayanan Transportasi

- Mengoptimalkan pemasangan rambu pendukung pada perlintasan sebidang KA ;
- Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar;
- mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Lumajang diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity) dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah

kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

Secara umum kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dijabarkan pada Tabel 7.1 TC.28 tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Tabel 7.1 TC 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awalr periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian	Indeks Layanan Infrastruktur	angka	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dibagi 4	85,40	86,09	86,79	87,45	87,45
	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	angka	Jumlah pelanggaran/Jumlah Kendaraan	0,25	3,26	2,74	0,0227	0,0227

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	(Jumlah angkutan umum yang laik jalan/Jumlah angkutan umum) x 100%	45,34%	46,70%	48,64%	49,85%	49,85%
		Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	(Jumlah Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik/ Jumlah Prasarana Perhubungan yang ada)x100%	94,50%	95,22%	96,35%	97,41%	97,41%
	Menurunnya pelanggaran lalu lintas	Persentase tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	%	(jumlah kendaraan yg uji/jumlah kendaraan wajib uji) x 100 %	48,00%	50,80%	52,35%	54,62%	54,62%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang memadai	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	%	$(\text{Realisasi}-\text{Target})/\text{Target} \times 100 \%$	N/A	4,20%	5,35%	6,52%	6,52%
	Terlaksananya pemenuhan prasarana perhubungan yang memadai	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	%	Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang/Jumlah Kebutuhan Perlengkapan jalan $\times 100\%$	43,85%	44,60%	45,85%	46,55%	46,55%
	Terlaksananya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	$(\text{Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi}/\text{Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan}) \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 3 (tiga) tahunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Lumajang tahun 2024–2026 digunakan sebagai acuan atau panduan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun-tahun sebelumnya.

Lumajang, 4 Mei 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.

NIP. 19711102 199803 1 002

Tabel T.C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	N/A	N/A	3,00	6,00	5,27	4,86	4,11	3,00	6,00	0,01%	0,25%	N/A	100	100	0,0019	0,0514	N/A
	Persentase Penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,27 %	3,06 %	2,45 %	N/A	N/A	1,1%	1,15%	N/A	N/A	N/A	25,761	37,582	N/A
2	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	N/A	N/A	N/A	19 %	10 %	12,3 %	13,2 %	14,7 %	19 %	10 %	8,1%	45,34%	N/A	100	100	65,854	343,48	N/A
	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A	52,85%	84%	N/A	N/A	N/A	52,85	84	N/A
3	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	N/A	N/A	N/A	88 %	90 %	91,13 %	92,57 %	93,11 %	88%	90 %	92%	94,50%	N/A	100	100	100,95	102,08	N/A
	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,13 %	90,57 %	91,11 %	N/A	N/A	90,45%	92%	N/A	N/A	N/A	101,48	101,58	N/A

Tabel T.C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan 2019-2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.614.218.700	1.364.432.100	N/A	N/A	N/A	1.557.912.529	1.247.882.433	N/A	N/A	N/A	0,97	0,91	N/A	N/A	N/A	-	0,15	-	0,01
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.238.355.000	1.333.090.400	N/A	N/A	N/A	3.088.425.000	1.129.182.614	N/A	N/A	N/A	0,95	0,85	N/A	N/A	N/A	-	0,59	-	0,03
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	43.252.000	24.647.000	N/A	N/A	N/A	40.789.400	23.807.780	N/A	N/A	N/A	0,94	0,97	N/A	N/A	N/A	-	0,43		0,01
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.339.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.134.405.800	N/A	N/A	N/A	N/A	0,91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	12.793.375.180	14.113.135.676	14.409.710.370	N/A	N/A	12.458.945.141	12.968.792.819	2.055.731.315	N/A	N/A	0,97	0,92	0,14	0,11	-	0,45	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.494.252.000	3.249.908.600	N/A	N/A	N/A	1.253.338.000	2.759.394.813	N/A	N/A	N/A	0,84	0,85	N/A	N/A	N/A	1,17		0,00	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.510.467.000	2.201.422.200	N/A	N/A	N/A	1.433.824.841	2.126.955.381	N/A	N/A	N/A	0,95	0,97	N/A	N/A	N/A	0,46		0,00	
PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	25.946.128.500	21.978.849.400	N/A	N/A	N/A	24.662.365.938	21.427.886.284	N/A	N/A	N/A	0,95	0,97	N/A	N/A	N/A	-	0,15		0,01

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	N/A	N/A	22.158.094.723	23.363.141.764	22.987.322.067	N/A	N/A	21.798.933.989	22.632.748.325	5.164.442.421	N/A	N/A	0,98	0,97	0,22	0,05	-	0,39
---	-----	-----	----------------	----------------	----------------	-----	-----	----------------	----------------	---------------	-----	-----	------	------	------	------	---	------

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian		Indeks Layanan Infrastruktur	%	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dibagi 4	86,09	86,79	87,45
	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	angka	Jumlah pelanggaran/Jumlah Kendaraan	3,26	2,74	2,27
		Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	(Jumlah angkutan umum yang laik jalan/Jumlah angkutan umum) x 100%	46,70	48,64	49,85

		Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	(Jumlah Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik/ Jumlah Prasarana Perhubungan)x100%	95,22	96,35	97,41
--	--	--	----------	---	--------------	--------------	--------------

TC - 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Terciptanya infrastruktur pendukung perekonomian	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1	Meningkatkan konektivitas wilayah beserta prasarana perhubungan dengan jalan penurunan pelanggaran lalu lintas	1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	%	(jumlah kendaraan yg uji/jumlah kendaraan wajib uji) x 100 %	48%	50,80%	1.684.500.000	52,35%	2.170.000.000	54,62%	2.175.000.000	54,62%	6.029.500.000	Dinas Perhubungan	Kabupaten Lumajang
2.15.02.2.01	Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	N/A	1 Dokumen	107.700.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	357.700.000		
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000		
	Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	1 Dokumen	7.700.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	37.700.000		

	Terkendalinya pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	1 Laporan		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	20.000.000		
2.15.02.2.04	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	Dokumen	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	N/A	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	60.000.000		
	Terfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	18 Dokumen	30.000.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	N/A	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	18 Laporan	30.000.000		
2.15.02.2.07	Terlaksananya fasilitasi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	Dokumen	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	11 Dokumen	5 Dokumen	82.400.000	5 Dokumen	95.000.000	5 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	277.400.000		

	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	N/A	12 Laporan	77.400.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	90.000.000	36 Laporan	252.400.000		
	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	25.000.000		
2.15.02.2.08	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	6.606 pelanggaran	6.500 Pelanggaran	914.200.000	6.210 Pelanggaran	990.000.000	5.800 Pelanggaran	990.000.000	5.800 Pelanggaran	2.894.200.000		
	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	30 orang	-	30 orang	20.000.000	30 orang	20.000.000	30 orang	40.000.000		
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	N/A	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	30.000.000		
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	12 laporan	12 Laporan	904.200.000	12 Laporan	950.000.000	12 Laporan	950.000.000	36 Laporan	2.804.200.000		
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	N/A	6 Laporan	-	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	18 Laporan	20.000.000		

2.15.02.2.05	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	unit	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	5.316 unit	5.504 unit	560.200.000	5.685 unit	940.000.000	5.812 unit	940.000.000	17.001 unit	2.440.200.000		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana (Alat Uji Kendaraan) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	18 unit	18 unit	245.200.000	18 unit	250.000.000	18 unit	250.000.000	18 unit	745.200.000		
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	25 orang	-	25 orang	20.000.000	25 orang	20.000.000	25 orang	40.000.000		
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	4000 set	4000 Dokumen	120.000.000	4000 Dokumen	150.000.000	4000 Dokumen	150.000.000	2.000 Dokumen	420.000.000		
	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	2 laporan	-	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	6 laporan	20.000.000		
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana (Alat uji) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	9 unit	9 unit	195.000.000	9 unit	500.000.000	9 unit	500.000.000	9 unit	1.195.000.000		

	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	12 laporan	-	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	36 laporan	20.000.000		
	Tersedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang memadai	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan	%	(Realisasi-Target)/Target x 100 %	N/A	4,20%	934.565.500	5,35%	1.485.000.000	6,52%	1.180.000.000	6,52%	3.599.565.500		
2.15.02.2.03	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	orang	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	75.748 orang	84.700 orang	310.965.500	84.700 orang	500.000.000	84.700 orang	500.000.000	254.100 orang	1.310.965.500		
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang dipelihara	unit	Jumlah Terminal yang dipelihara	2 unit	4 Unit	310.965.500	4 Unit	500.000.000	4 Unit	500.000.000	4 Unit	1.310.965.500		
2.15.02.2.09	Tersedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	Trayek	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	3 Trayek	3 Trayek	593.600.000	3 Trayek	660.000.000	3 Trayek	660.000.000	3 Trayek	1.913.600.000		
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 unit	52 unit	593.600.000	52 unit	650.000.000	52 unit	650.000.000	52 unit	1.893.600.000		

	Terkendalinya dan terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	20.000.000		
2.15.02.2.10	Ditetapkannya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	90.000.000	-	-	1 Dokumen	90.000.000		
	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.10.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	70.000.000	-	-	1 Dokumen	70.000.000		
	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	20.000.000	-	-	1 Dokumen	20.000.000		
2.15.02.2.11	Ditetapkannya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	N/A	-	-	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	80.000.000		

	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000		
	Ditetapkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	20.000.000	-	-	1 Dokumen	20.000.000		
	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000		
2.15.02.2.12	Ditetapkannya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	N/A	-	-	1 Dokumen	60.000.000	-	-	1 Dokumen	60.000.000		

	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 Dokumen	60.000.000	-	-	1 Dokumen	60.000.000		
2.15.02.2.14	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	Dokumen	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	N/A	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	15 Dokumen	30.000.000		
	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	18 Laporan	30.000.000		
2.15.02.2.16	Ditetapkannya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang ditetapkan	Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang ditetapkan	N/A	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	115.000.000		

	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	50.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000		
	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	10.000.000	-	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	30.000.000		
	Terkendalinya dan terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	5.000.000	3 laporan	25.000.000		
														-		
	Terlaksananya pemenuhan prasarana perhubungan yang memadai	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	%	Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang/ Jumlah Kebutuhan Perlengkapan jalan x 100%	43,85%	44,60%	21.707.367.481	45,85%	23.104.076.279	46,55%	26.079.983.906	46,55%	70.891.427.666		
2.15.02.2.02	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ditingkatkan kondisinya	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	unit	Jumlah Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	2 Jenis	4.100 unit	20.904.234.500	4.312 unit	21.704.234.500	4.475 unit	24.088.056.256	4.475 unit	66.696.525.256		

	Tersedianya Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	unit	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan (APJ) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 unit	40 unit	505.000.000	143 unit	805.000.000	143 unit	1.588.821.756	429 unit	2.898.821.756		
	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Perengkapan Jalan	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6800 unit	5.600 Unit	20.399.234.500	6.975 Unit	20.899.234.500	6.975 Unit	22.499.234.500	6.975 Unit	63.797.703.500		
2.15.02.2.06	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kegiatan	Jumlah manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang dilaksanakan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	803.132.981	2 Kegiatan	1.399.841.779	2 Kegiatan	1.991.927.650	6 Kegiatan	4.194.902.410		
	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	unit	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.511 buah	513 unit	773.132.981	1.322 unit	1.369.841.779	1.322 unit	1.849.927.650	3.966 unit	3.992.902.410		
	Terawasinya dan terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	12 Laporan	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	22.000.000	30 Laporan	42.000.000		
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	Laporan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	6 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	120.000.000	36 Laporan	160.000.000		

#####	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	(Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi/ Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan)x 100%	100%	100%	14.357.710.389	100%	15.793.481.427	100%	17.372.829.569	100%	47.524.021.385		
2.15.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	(Jumlah fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi/ Jumlah fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan)x 100%	100%	100%	14.000.000	100%	26.900.000	100%	26.900.000	100%	67.800.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	4.300.000	2 Dokumen	4.300.000	7 Dokumen	10.600.000		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.300.000	3 Dokumen	8.600.000		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.300.000	2 Dokumen	3.300.000	6 Dokumen	8.600.000		

	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.300.000	3 Dokumen	6.600.000		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.300.000	3 Dokumen	6.600.000		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	7.400.000	5 Laporan	7.400.000	15 Laporan	17.800.000		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	36 Laporan	9.000.000		
2.15.01.2.02	Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	(Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan)x 100%	100%	100%	9.637.296.907	100%	9.774.331.839	100%	9.774.331.839	100%	29.185.960.585		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 orang	116 orang/12bulan	9.567.360.907	116 orang/12bulan	9.700.895.839	116 orang/12bulan	9.700.895.839	116 orang/36bulan	28.969.152.585		

	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	63.936.000	12 Dokumen	63.936.000	12 Dokumen	63.936.000	36 Dokumen	191.808.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.15.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	36 Dokumen	8.000.000		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	3 Laporan	8.000.000		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	36 Laporan	9.000.000		
2.15.01.2.03	Tepenuhnya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	%	(Jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan)x 100%	100%	100%	5.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	23.000.000		

	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.15.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	6 Dokumen	8.000.000		
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.15.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	6 Laporan	7.000.000		
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	36 Laporan	8.000.000		
2.15.01.2.04	Terpenuhinya fasilitasi administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	%	(Jumlah fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang terpenuhi/Jumlah fasilitasi Administrasi	100%	100%	2.223.100.000	100%	2.524.100.000	100%	2.524.100.000	100%	7.271.300.000		
	Tersedianya rencana pengelolaan Retribusi Daerah	2.15.01.2.04.01 Perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen rencana pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen rencana pengelolaan Retribusi Daerah	N/A	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	9 Dokumen	8.000.000		
	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2.15.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	10 Dokumen	12 Dokumen	2.221.100.000	12 Dokumen	2.521.100.000	12 Dokumen	2.521.100.000	36 Dokumen	7.263.300.000		

2.15.01 .2.05	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	%	(Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi/ Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian PD yang direncanakan)x 100%	100%	100%	6.800.000	100%	334.000.000	100%	583.711.830	100%	924.511.830		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	275 Paket	-	275 Paket	250.000.000	275 Paket	499.711.830	825 Paket	749.711.830		
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	36 Dokumen	7.900.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.15.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	9 Dokumen	6.000.000		
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	36 Dokumen	7.900.000		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	250 Orang	3.000.000	250 Orang	75.000.000	250 Orang	75.000.000	750 Orang	153.000.000		

2.15.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	%	(Jumlah fasilitas Administrasi Umum PD yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Umum PD yang direncanakan)x 100%	100%	100%	371.794.934	100%	466.162.200	100%	536.162.200	100%	1.374.119.334		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.638.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	3 Paket	72.638.000		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	121.664.734	3 Paket	125.000.000	3 Paket	125.000.000	9 Paket	371.664.734		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	111.162.200	2 Paket	111.162.200	2 Paket	111.162.200	6 Paket	333.486.600		
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A	10 Dokumen	-	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	10.000.000		
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	lapaoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A	12 Laporan	-	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	36 Laporan	40.000.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 Laporan	116.330.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	250.000.000	36 Laporan	546.330.000		

2.15.01.2.07	Terpeenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	%	(Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang terpeenuhi/Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang direncanakan)x 100%	100%	100%	25.400.000	100%	330.000.000	100%	750.000.000	100%	1.105.400.000		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	N/A	8 unit	-	1 unit	180.000.000	1 unit	500.000.000	10 unit	680.000.000		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	9 unit	25.400.000	9 unit	150.000.000	-	250.000.000	18 unit	425.400.000		

2.15.01.2.08	Terpeenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	(Jumlah fasilitas jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipenuhi/Jumlah fasilitas jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang direncanakan)x 100%	100%	100%	681.939.600	100%	718.459.600	100%	788.000.000	100%	2.188.399.200		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	134.880.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	170.000.000	36 Laporan	454.880.000		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.600.000	12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	18.000.000	36 Laporan	51.600.000		

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awalr periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian	Indeks Layanan Infrastruktur	angka	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dibagi 4	85,40	86,09	86,79	87,45	87,45
	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	angka	Jumlah pelanggaran/Jumlah Kendaraan	0,25	3,26	2,74	2,27	2,27
		Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	(Jumlah angkutan umum yang laik jalan/Jumlah angkutan umum) x 100%	45,34	46,70	48,64	49,85	49,85

	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	(Jumlah Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik/ Jumlah Prasarana Perhubungan yang ada)x100%	94,5	95,22	96,35	97,41	97,41
Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	Persentase tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	%	(jumlah kendaraan yg uji/jumlah kendaraan wajib uji) x 100 %	48,00	50,80	52,35	54,62	54,62
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum yang memadai	Persentase peningkatan ketersediaan angkutan umum yang memadai	%	(Realisasi-Target)/Target x 100 %	N/A	4,20	5,35	6,52	6,52
Terlaksananya pemenuhan prasarana perhubungan yang memadai	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan	%	Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang/ Jumlah Kebutuhan Perlengkapan jalan x 100%	43,85	44,6	45,85	46,55	46,55

	Terlaksananya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	(Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi/Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan)x 100%	100	100	100	100	100
--	---	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel TB - 3.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur	Kurang optimalnya pelayanan transportasi	Rendahnya kepatuhan pengusaha angkutan umum dalam melakukan uji kir berkala Kurangunya sarana dan prasarana perlengkapan jalan Terbatasnya material untuk pemeliharaan perlengkapan jalan Kurangunya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan Adanya persaingan usaha dengan angkutan umum online yang berdampak pada penurunan pendapatan Kurangunya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas